

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1. Implementasi Kebijakan

Implementasi (ASHARI, 2022) berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat bagi seseorang. Sesuatu yang mempengaruhi kehidupan suatu negara dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan dan instruksi dari instansi pemerintah.

Implementasi menurut teori Jones (DEWI, 2020) “Fungsi ini untuk eksekusi program” (menjalankan program untuk menampilkan hasil), sedangkan Horn dan Meter "Tindakan individu (atau kelompok) publik dan swasta yang mewakili pencapaian atau tujuan politik masa lalu" (tindakan pemerintah).

Implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (Agusti, 2022) (Khairina, 2021) berpendapat bahwa pemahaman pasca program menjadi fokus perhatian pemerintah ketika merencanakan implementasi kebijakan. Dikatakan juga bahwa implementasi adalah peristiwa yang terjadi setelah pengesahan pedoman politik negara. Proses implementasi berlangsung dalam beberapa tahapan, misalnya tahapan proses legislasi, dari situ muncul prakarsa diplomasi esensial berupa instruksi pelaksanaan.

Dalam Rustiana (Rustiana et al., 2022a), Pressman dan Wildavsky menjelaskan bahwa implementasi digambarkan sebagai interaksi antara orang-

orang yang bekerja untuk mencapai suatu tujuan dan tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut, atau kemampuan untuk melibatkan orang-orang dalam percakapan dua arah tentang suatu topik untuk dimasukkan untuk mencapai tujuan ini (Rustiana et al., 2022a).

Sementara itu, menurut Robert Nakamura dan Frank Smallwood (Nurasiah, 2022), faktor penting dalam implementasi kebijakan adalah kemampuan menilai situasi secara akurat sebelum mengambil kesimpulan cepat. Implementasi adalah proses diskusi sederhana antara pemangku kepentingan yang berbeda untuk menentukan apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan dengan cara ini. Implementasi perubahan kebijakan yang merugikan tujuan program yang dimaksud.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan adalah suatu kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan menurut peraturan yang berlaku, terkait dengan peraturan yang dilaksanakan dalam keputusan politik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Terapkan rencana yang dipikirkan dengan matang, baik secara individu maupun sebagai tim.

2.1.2. Model Implementasi

Agar kebijakan publik berhasil, perlu dipahami variabel-variabel dan faktor-faktor penyebabnya. Oleh karena itu, diperlukan model operasional khusus yang meningkatkan pemahaman tentang implementasi kebijakan tertentu. Ada banyak model yang dapat digunakan untuk menganalisis berbagai implementasi kebijakan. Namun penelitian ini dapat menjelaskan model implementasi yang

dihadirkan oleh Van Meter dan Van Horn dengan dua syarat yang harus diperhatikan.

Pertama, kemungkinan penegakan tergantung pada jenis kebijakan yang bersangkutan. Kedua, faktor-faktor yang dapat mencapai tujuan program berbeda untuk setiap kebijakan. Oleh karena itu, untuk pendapat pertama Van Meter dan Van Horn tentang implementasi (Siregar, 2022), indikator berikut dapat digunakan untuk mengidentifikasi kebijakan:

A. Komunikasi Antar Organisasi Dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksana

Komunikasi adalah proses dimana media menyampaikan informasi kepada lingkungan. Selain itu, komunikasi kebijakan mengacu pada proses dimana informasi dikomunikasikan dari pengenal kebijakan kepada penegak kebijakan. Tiga aspek terpenting dari komunikasi yang efektif adalah transformasi informasi (transmisi), kejelasan informasi, dan konsistensi informasi (koherensi). Dimensi perubahan harus diperlukan untuk memastikan bahwa informasi tersebut dikomunikasikan kepada semua pihak terkait, termasuk kelompok dan organisasi terkait. Dalam konteks implementasi kebijakan, salah tafsir terhadap kelompok sasaran dan siklus implementasi kebijakan yang ketat harus dihindari.

Di sisi lain, dimensi konsistensi mensyaratkan bahwa informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan bagi pelaksana kebijakan, kelompok sasaran dan pihak terkait. Komunikasi antara organisasi dan manajemen merupakan bagian dari kejelasan inisiatif yang

mendasari dan tujuan implementasi, yang kemudian disinkronkan dengan aturan komunikasi para eksekutif.

B. Kondisi-Kondisi Sosial Dan Ekonomi Politik

Sumber daya memainkan peran penting dalam implementasi kebijakan. Ini berarti bahwa tidak peduli seberapa jelas dan konsistennya peraturan dan regulasi ini, dan tidak peduli seberapa keras penegakannya, mereka tidak dapat ditegakkan secara efektif dan selanjutnya ditegakkan oleh lembaga penegak politik. tidak akan efektif. Perlu juga diperhatikan evaluasi efektivitas implementasi kebijakan menurut kondisi sosial politik Van Meter dan Horn (Siregar, 2022), yang dapat dievaluasi menggunakan pernyataan dengan sumber daya keuangan yang memadai. termasuk sumber daya untuk mendukung implementasi dan kondisi ekonomi dan sosial. Mereka dipengaruhi oleh implementasi kebijakan, makna kebijakan, elit yang mendukung dan menentang implementasi, dan oposisi dari pendukung dan kelompok pendukung dan penentang kebijakan.

C. Kecenderungan Pelaksana-Pelaksana

Sasaran strategis dan karakteristik implementasi kebijakan memegang peranan penting dalam implementasi kebijakan sesuai dengan tujuan atau spesifikasinya. Kualitas penting yang harus dimiliki oleh pengambil keputusan politik, seperti kejujuran dan komitmen yang tinggi. Integritas memandu para

pelaksana untuk mengikuti prinsip-prinsip program yang telah ditetapkan, sedangkan komitmen yang tinggi dari para pelaksana politik mendorong mereka untuk selalu memenuhi tugas, wewenang, tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Sikap penguji diperiksa berdasarkan tiga unsur jawaban pelaksana yaitu pemikiran, jenis jawaban, dan intensitas kesetujuan, netralitas atau ketidaksepakatan. Implementer benar-benar mengetahui bahwa pemahaman mereka secara umum dan rinci tentang tindakan dan tujuan kebijakan penting untuk keberhasilan kebijakan. Dengan demikian, ketidaktaatan mereka terhadap kebijakan berkontribusi pada kegagalan penegakan kebijakan.

Penting bagi guru untuk fokus pada langkah dan tujuan. Politisi tidak dapat mengimplementasikan kebijakan jika mereka menolak tujuan yang terkandung di dalamnya. Jika tidak, jika Anda menerima konten dan kebijakannya, kebijakan tersebut akan memenuhi tujuannya. Implementer menolak tujuan politik dengan berbagai alasan, yaitu tujuan dan orientasi yang bertentangan dengan sistem nilai implementor, loyalitas di luar organisasi, keegoisan, atau preferensi terhadap pola interpersonal yang ada.

D. Karakteristik-Karakteristik Dari Badan Pelaksana

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini menyangkut dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri, aspek pertama bersifat

mekanis. SOP (Standard Operating Procedures) umumnya digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan. SOP merupakan instruksi kepada setiap pelaksana, yang harus bertindak sedemikian rupa agar pelaksanaan perintah tidak menyimpang dari jiwa dan tujuan perintah. Aspek lain adalah struktur birokrasi. Struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi melemahkan kontrol dan mengarah pada proses birokrasi yang kompleks dan rumit, yang pada gilirannya membuat proses organisasi menjadi tidak fleksibel. Ciri-ciri badan eksekutif adalah struktur formal organisasi dan ciri informal para anggotanya. Unsur-unsur yang mempengaruhinya terdiri dari Komponen dan ukuran yang unggul, tingkat kendali atas keputusan dan proses, sumber daya politik, vitalitas, tingkat komunikasi terbuka, dan hubungan formal dan informal antara institusi dan pembuat keputusan.

2.1.3 Penataan Pasar

Penataan adalah segala upaya negara untuk mengatur dan menata keberadaan dan penciptaan usaha modern sedemikian rupa sehingga pasar tradisional, usaha mikro, UKM, dan koperasi yang ada tidak rusak atau musnah. Sikap adalah kata sifat yang digunakan untuk membawa sesuatu ke dalam bentuk atau hasil yang terlihat. Kontrol adalah proses perencanaan yang bertujuan untuk meningkatkan keteraturan, keteraturan, dan keamanan. Penataan menjadi bagian dari proses penyelenggaraan negara, dimana proses penataan dapat menjamin tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Kontrak dapat dirumuskan sebagai syarat kontrak, pengembalian, hasil atau keputusan (Hardiati, 2021). Dalam bukunya Pengantar Planologi, Sujarto

mengemukakan bahwa manajemen, seperti halnya proses perencanaan, operasional, dan pengendalian, merupakan satu kesatuan sistem yang tidak dapat dipisahkan. Pada dasarnya kebutuhan untuk menata berbagai tingkatan wilayah tidak lepas dari perkembangan masalah pembangunan (Sujarto, 2003:50) Regulasi adalah segala upaya negara untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian perusahaan modern sedemikian rupa sehingga pasar tradisional, usaha mikro, UKM, dan koperasi yang ada tidak rusak atau musnah.

Tujuan kebijakan regulasi dan izin pengembangan pasar adalah untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing pelaku ekonomi modal besar dan kecil. Dengan pesatnya perkembangan usaha eceran dan grosir modern kecil menengah, maka pengelolaan pasar modern dituntut untuk menjaga keseimbangan pasar tradisional, saling membutuhkan, saling menguatkan dan saling menguntungkan melalui kemitraan usaha pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern. Tujuan dari kepemimpinan pemasaran adalah untuk mengoreksi pemasar kemudian membimbing mereka dalam pelaksanaan strategi pemasaran agar pemasar dapat selalu bertindak sesuai rencana dan mencapai hasil yang optimal.

2.1.4 Pembinaan Pasar

Kursus ini ditujukan untuk manajer bisnis yang melakukan pekerjaan pengembangan di bidang legislasi, saran teknis, konsultasi atau bidang sains dan teknologi lainnya. Melalui pelatihan, penanggung jawab lebih memahami peraturan yang berlaku dan menerima bimbingan teknis dan petunjuk tentang bagaimana menerapkan peraturan tersebut secara efektif. Selain itu, pelatihan dapat memberikan saran dan pembaruan tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi, memungkinkan para manajer untuk tetap menjadi yang terdepan dan meningkatkan kualitas bisnis mereka.

Oleh karena itu, pelatihan menjadi kegiatan penting yang memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan para pemimpin bisnis untuk menghadapi perubahan yang sedang terjadi. Instruksi untuk operator masih hilang. Mata kuliah manajemen pemasaran retail tentunya menjadi nilai tambah yang sangat penting untuk meningkatkan penjualan, karena retailer biasanya tidak dapat bersaing dengan pasar modern lainnya tanpa pendidikan yang baik.

Dalam kaitannya dengan manajemen pemasaran tradisional, penelitian ini mengkaji beberapa komponen manajemen pemasaran. Komponen utama yang perlu mendapat perhatian adalah bangunan, pasar, gang antar warung dan jalan utama. Komponen-komponen tersebut merupakan unsur terpenting yang menjadi dasar sebuah pasar tradisional yang tertata dan tertata dengan baik. Selain itu, ada juga komponen pendukung yang tidak boleh diabaikan. Komponen pendukung tersebut antara lain rambu-rambu pemasaran klasik seperti rambu, gerbang atau monumen.

Selain itu, papan informasi, toilet, mushola, air bersih, pengelolaan sampah, parkir, pengaman kebakaran dan pengelolaan sampah juga menjadi komponen yang sangat penting untuk menjamin kelangsungan dan kenyamanan pengunjung dan pedagang di pasar tradisional. Dengan tatanan pasar yang baik dan lengkap dengan komponen-komponen tersebut diharapkan pasar tradisional masyarakat dapat memberikan pengalaman berbelanja yang nyaman dan aman.

Pengembangan manajemen pemasaran yang tepat juga meningkatkan daya saing peritel di pasar modern yang terus menyusut.

2.2 Faktor Penghambat Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional

Penataan dan promosi pasar tradisional di Kota Batam terhambat oleh beberapa faktor antara lain, kurangnya pemahaman para pedagang terhadap Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Pembinaan Pasar terkait dengan aturan kelompok barang, kurangnya jaminan kebersihan pasar, kurangnya pemahaman tentang pentingnya kebersihan lingkungan yang baik dalam menjaga kenyamanan niaga pada masyarakat niaga dan kenyamanan usaha. Pelatihan pengelolaan pasar tentunya merupakan nilai tambah yang sangat penting bagi peritel untuk meningkatkan penjualan, karena peritel biasanya tidak dapat bersaing dengan pasar modern lainnya tanpa pelatihan yang baik.

Tugas pokok dan tanggung jawab pengawas tidak dijalankan dengan baik. Masalah muncul dengan pejabat yang tidak memahami dengan jelas peran dan tanggung jawab organisasi. Ini karena kurangnya pemahaman yang ditunjukkan kepada mereka. Meningkatkan keleluasaan karena manajer tidak memiliki hubungan yang baik dengan penanggung jawab tugas. Masalah lain yang muncul adalah pekerjaan paralel karena keterbatasan sumber daya manusia yang tersedia. Artinya, satu orang harus melakukan beberapa tugas sekaligus. Selain itu, adanya duplikasi yang tidak efisien dan proses rekrutmen yang tidak efisien sehingga kualitas pegawai tidak maksimal.

2.3 Peraturan Daerah Kota Batam No. 10 Tahun 2009 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar

Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi pendidikan, pelatihan, pengelolaan, pemeriksaan, perizinan dan pengaturan pasar, pendidikan, pelatihan dan pemeriksaan PKL di Kota Batam. Lokasi pasar tradisional dapat dilihat pada peta wilayah kota Batam dan peta wilayah detail. Pendirian pasar tradisional harus memenuhi persyaratan seperti mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan pasar tradisional lainnya, pusat niaga dan toko modern. Di bidang ini, usaha mikro dan kecil, termasuk koperasi, harus menyadari peluangnya.

- 1) Tempat parkir seluas 100 meter persegi harus disediakan untuk area pasar normal kendaraan roda empat. meter persegi) ruang usaha di pasar tradisional menyediakan tempat yang menjamin pasar tradisional yang bersih, sehat (higienis) dan ruang publik yang aman, baik dan nyaman untuk pesanan pasar, seperti, peraturan tentang pengembangan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, syarat perkembangan pasar, peraturan batas kawasan pasar. Standardisasi ekonomi pasar Menurut pasal 5 ayat 1 angka 1 UU, ekonomi pasar dapat diselenggarakan oleh kota, asosiasi komersial yang disetujui oleh pemerintah kota, koperasi dan kolaborasi antara kota dan perusahaan.
- 2) Pengembangan pasar sebagaimana dimaksud harus memenuhi standar yang paling sedikit meliputi, Kios/pertokoan, jalan dan gang, pembuangan limbah, penampungan antara dan pengomposan sampah, kantor pemeliharaan, toilet, mushola, penyediaan air bersih, halaman dan tempat

parkir, instalasi listrik, alat pemadam kebakaran (kotak surat), titik keamanan pasar, area kalibrasi ulang, taman dan ruang hijau, fasilitas pengolahan limbah.

- 3) Setiap bangunan komersial diidentifikasi dengan batas atau tanda yang jelas yang memisahkannya dari bangunan di sekitarnya.
- 4) Pengembangan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 15 Perda ini.
- 5) Pembakuan pengembangan pasar tersebut pada alinea kedua berlaku untuk semua pasar kecuali pasar sementara.

Pada saat yang sama, walikota dapat mengarahkan pembinaan usaha PKL melalui dinas/unit teknis terkait, termasuk pelatihan, pengaturan, penyuluhan, dan informasi dan manajemen.

2.4 Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Tanpa pelatihan yang tepat, pedagang tidak bisa. Faktor-faktor tertentu dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Edward III dalam Jamaluddin Ahmad (Utami, 2022) mengemukakan empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik, yaitu kurangnya pemahaman pedagang tentang aturan pengelompokan barang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Pembinaan Pasar, kurangnya perhatian terhadap kebersihan pasar dan kurangnya pemahaman akan perlunya kebersihan lingkungan yang baik untuk menjaga kenyamanan berbelanja masih lemah.

Biasanya bersaing dengan pasar modern lainnya. Tentu saja, pelatihan manajemen pemasaran sangat penting untuk memberikan keunggulan ekstra bagi pemasar dalam meningkatkan penjualan. Tugas pokok dan tanggung jawab pengawas tidak ditangani seefisien mungkin. Contohnya adalah karyawan yang masih belum memahami peran dan tanggung jawab organisasi, diskresi karena manajemen tidak memiliki hubungan yang baik dengan orang yang menduduki jabatan tersebut, duplikasi pekerjaan karena kurangnya sumber daya manusia, tugas yang tumpang tindih dan tidak efisien. prosedur kepegawaian.

2.5 Peraturan Daerah Kota Batam No. 10 Tahun 2009 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar

Surat persetujuan ini meliputi seluruh pelaksanaan, pelatihan, pendidikan, inspeksi, perizinan dan pengaturan pasar PKL Kota Batam, serta pelaksanaan, pelatihan dan pengelolaan PKL. Dalam menentukan lokasi pasar tradisional harus memperhatikan tata ruang dan detail kota Batam. Prasyarat pendirian pasar tradisional adalah terpenuhinya syarat-syarat sebagai berikut, dengan memperhatikan lingkungan sosial ekonomi dan keberadaan pasar tradisional, pusat niaga dan toko modern di sekitarnya, dengan memperhatikan koperasi dan usaha mikro dan kecil. Fokusnya adalah kemungkinan akuisisi tempat usaha bagi pedagang pasar tradisional yang sebelumnya menempati lahan parkir minimal empat meter persegi. Pasar tradisional menawarkan peluang untuk mengubah pasar tradisional menjadi ruang publik yang bersih, sehat (higienis), aman, terawat, dan nyaman.

Penataan pasar meliputi pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, penentuan syarat-syarat pendirian pasar dan penentuan batas-batas kawasan pasar. Standar Pembangunan Pasar Bagian 5 Bagian 1 Pembangunan pasar dapat dilakukan oleh pemerintah kota, dunia usaha yang mendapat persetujuan walikota, koperasi, kerjasama antara pemerintah kota dan pengusaha. Bangunan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 di atas harus memenuhi standar, yang meliputi sekurang-kurangnya los/warung, jalan dan gang, tong, tempat penampungan dan sarana pengomposan, sarana parkir listrik dan pengomposan, sarana pemeliharaan, halaman, sarana pemeliharaan, alat pemadam kebakaran (kotak surat), pos keamanan pasar, tempat tera ulang, taman dan mesin kehutanan.

Setiap bangunan ruko ditandai dengan demarkasi yang jelas atau tanda pembeda dari bangunan sekitarnya. Budidaya pasar yang disebutkan dalam § 1 berlangsung sesuai dengan ketentuan pasal 7 dan 15 dari tatanan negara bagian ini. Standar pengembangan pasar yang disebutkan pada poin 2 berlaku untuk semua pasar kecuali pasar sementara.

Sementara itu, walikota penanggung jawab pembinaan usaha PKL dapat melakukan pembinaan melalui dinas/unit teknis terkait, antara lain pelatihan, pengaturan, penyuluhan dan penyampaian serta pengelolaan.

2.6 Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Sejumlah faktor dapat mempengaruhi berhasil tidaknya suatu kebijakan diimplementasikan. Edward III mengemukakan empat unsur yang mempengaruhi berhasil tidaknya kebijakan publik diimplementasikan dalam Jamaluddin Ahmad (Hutagalung, 2022)(2011: 84), antara lain:

1. Komunikasi

Proses komunikasi dalam perusahaan sangat sulit dan rumit. Mereka dapat ditransfer atau disimpan hanya untuk tujuan tertentu. Selain itu, sumber data yang berbeda menyebabkan interpretasi yang berbeda. Implementasi yang efektif mensyaratkan bahwa mereka yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan keputusan menyadari kemampuan mereka. Implementasi inisiatif politik menjadi jauh lebih sulit karena kurangnya komunikasi dengan mereka yang mengimplementasikannya.

2. Sumber Daya (*Resources*)

Menurut Edward III dalam penelitian Leo Agustino (2006:158-159) sumber daya penting untuk implementasi kebijakan yang baik. Indikator digunakan untuk menunjukkan seberapa besar sumbangsih sumber daya terhadap implementasi kebijakan.

3. Sikap (*Disposition atau attitudes*)

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan adalah sikap pelaksana. Jika pelaksana setuju dengan isi kebijakan, ia dengan

senang hati akan melaksanakannya, tetapi jika pandangannya berbeda dengan pembuat keputusan, banyak masalah akan muncul dalam proses implementasi.

4. Struktur organisasi

Ini memiliki implikasi yang signifikan untuk implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini menyangkut dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama bersifat mekanis. SOP (Standard Operating Procedures) umumnya digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan. SOP merupakan instruksi bagi setiap pelaksana yang harus bertindak agar pelaksanaan instruksi tidak menyimpang dari maksud dan tujuan instruksi tersebut. Aspek lain adalah struktur birokrasi. Struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi melemahkan kontrol dan menyebabkan proses birokrasi yang kompleks dan rumit, yang pada gilirannya membuat proses organisasi menjadi tidak fleksibel.

2.7 Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
1	Yadi Lustiadi, 2019	Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Pasar Tradisional di Kabupaten Ogan Komering Ulu	Penelitian Kualitatif Deskriptif dilakukan dengan observasi dan wawancara kepada masyarakat yang bersangkutan	Dilihat dari tujuan penataan pasar yang tertuang dalam peraturan daerah kabupaten Ogan Komering Ulu nomor 04 tahun 2010 tentang pengelolaan pasar, bahwa penataan pasar bertujuan untuk menciptakan

				keteraturan dalam susunan pasar dan ketersediaan fasilitas umum pasar untuk menciptakan akses yang baik, kenyamanan yang terjamin, serta kecukupan sarana.
2	Erna Rustiana, Ikeu Kania, Anisa Nisrinna (2022)	Implementasi kebijakan penataan dan pembinaan pasar tradisional di kecamatan Semarang kabupaten Garut(Studi Pasar Wisata Semarang)	penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi	Hasil penelitian menjelaskan bahwa implementasi penataan dan pembinaan pasar tradisional belum dilaksanakan secara optimal, dilihat dari sasaran dan tujuan yang belum memberikan arah kebijakan yang jelas, belum didukung sumber daya yang handal dan kompeten, serta belum adanya pembinaan yang baik kepada para pedagang terkait optimalisasi pemanfaatan pasar wisata Samarang sebagai center of market Kabupaten Garut.

3	Hilmi Dzakaaul Islam, I Wayan Yogik Adnyana Putra Ni Wayan Ardiarani Utami, 2020	Redesain Interior Pasar Ngentak Desa Dayu di Kabupaten Blitar	Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data kualitatif	Hasil yang diperoleh adalah perancangan redesain Pasar Ngentak dengan tema kontemporer dan konsep etnik lokal khas Kabupaten Blitar yang memberi desain dan tatanan baru pada pasar tradisional, sehingga bisa mengatasi permasalahan ruang yang ada sekaligus mengubah pandangan tentang pasar tradisional menjadi positif.
4	Ovyan Subekti, Syaiful Mahfud Abdulloh, Dian Suluh Kusuma dewi,2019	Implementasi Kebijakan Pasar Tradisional (Studi Kasus : Renovasi Pasar Desa Pakis Baru Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan)	Kualitatif dilakukan dengan keabsahan data data melalui triangulasi.	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penataan pasar tradisional belum dapat berjalan dengan optimal, hal ini terlihat dari: (1) tidak adanya peraturan desa sebagai pedoman dalam mengelola pasar, serta ketidaktahuan dan ketidakikutsertaan para pengelola

				<p>pasar terkait kegiatan renovasi pasar Desa, (2) Tidak adanya perpaduan sumber-sumber yang diperlukan dari produsen kepada konsumen, (3) kompleksnya hubungan kausalitas yang terjadi, (4) pelaksanaan dari kebijakan yang tidak sesuai dengan konsep awal, (5) tidak adanya pemahaman terhadap tujuan, komunikasi, koordinasi, penempatan tugas-tugas dengan benar, (6) penyalahgunaan wewenang pasar seperti tempat parkir.</p>
5	Ananda Mahardika Rafieqah Nalar Rizki (2021)	Analisis Implementasi Kebijakan Penataan Pasar Tradisional dan Toko Modern di Kota Medan	Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif. Metode ini digunakan untuk menganalisis implementasi kebijakan penataan pasar	Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat terdeskripsi pola implementasi kebijakan penataan pasar tradisional dan toko modern di kota Medan yang menunjukkan

			tradisional dan toko modern di kota Medan.	lemahnya penggunaan pendekatan administrasi dalam implementasi kebijakan tersebut, Sehingga dinas perdagangan tidak dapat melakukan tindakan penataan terhadap pasar tradisional dan toko modern di kota Medan.
6	Fitrianto, Eka (2018)	Pemberdayaan Pasar Lenteng Kabupaten Sumenep Berdasarkan Pasal 21 Ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional, Dan Penataan Pasar Modern.	Kualitatif Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada para pedagang di pasar Lenteng	Dari hasil dan pembahasan di dapat bahwa Pemberdayaan pasar lenteng yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep berdasarkan Pasal 21 Ayat (5) Perda No. 5 Tahun 2013 ini hanyalah sebagian kecil di dalam Pasal tersebut yang dilaksanakan oleh para petugas dinas yaitu Pasal 21 Ayat (5) huruf C dan huru F, hal ini terlihat jelas dengan upaya dinas yang hanya mementingkan

				<p>kepada pembangunan sarana fisik melalui loket dan revitalisasi pasar. Pemberdayaan yang dilakukan hanya berfokus pada pembenahan fisik Pasar Lenteng, namun tidak menyentuh sama sekali SDM dalam peningkatan pengetahuan dan skill para pedagang di Pasar Lenteng. Hambatan Pemerintah Kabupaten Sumenep adalah terdapat Indomaret di depan Pasar Lenteng, belum terbentuknya Asosiasi Pedagang, pendanaan dan minimnya petugas yang berada di lapangan, ketiadaan lahan parkir dan diperparah oleh membludaknya pedagang yang berjualan di pinggir jalan menyebabkan kemacetan, dan</p>
--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				ketersediaan sarana dan prasarana yang masih perlu perbaikan dan peremajaan.
7	Fatmala Utaminingsih, Hartuti Purnaweni, 2019	Fenomena-fenomena yang terkait Implementasi Kebijakan Retribusi Pasar dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pematang Jaya	Kualitatif Dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari para informan	Hasil penelitian Untuk kondisi pasar masih kurang nyaman, seperti becek ketika hujan, atap yang masih menggunakan terpal, adanya rentenir yang masuk ke pasar dan permasalahan lainnya.
8	Valentyna Stadnyk , Galyna Pchelianska , Yuliia Holovchuk , Liudmyla Dybchuk,2020	The Concept Of Marketing Of Balanced Development And Features Of Its Implementation In The Food Market	The method of SWOT analysis assessed the qualitative characteristics of the state of the market of organic products of Ukraine in the light of opportunities and obstacles to the implementation of the concept of «sustainable development»	The primary focus of the essay is an analysis of the dynamics of the growth of the Ukrainian food market as an economic sector and a source of national food security. Agro-food production, food processing, and the trading of food products were found to be growing as a result of increased domestic and global demand. Agro-food production, however, has a significant

				<p>impact on Ukraine's ecosystem because of resource and technological limits. Trends in the growth of organic agriculture were looked at in order to apply the concept of sustainable development in the food business. The author's assessment of the critical notion of a balanced market development was explained along with the complexity of marketing obligations for companies operating in the food industry.</p>
--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pada bab ini akan diuraikan terkait teori-teori yang mendasar dalam penelitian ini. Uraian berikut akan membantu untuk memahami gambaran topik dan permasalahan yang ada. Dalam penelitian ini saya berusaha untuk memberikan gambaran mengenai implementasi perda No. 10 tahun 2009 tentang penataan dan pembinaan pasar. Penelitian ini dilakukan oleh Meysi Ansari Br Ginting (Program Studi Administrasi Negara Universitas Putera Batam) dengan judul **“Implementasi**

Peraturan Daerah Kota Batam No. 10 Tahun 2009 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar”

Menurut penelitian (Lustiadi, 2019) bahwa penataan pasar bertujuan untuk menciptakan keteraturan dalam susunan pasar dan ketersediaan fasilitas umum pasar untuk menciptakan akses yang baik, kenyamanan yang terjamin,serta kecukupan sarana.

Menurut Hilmi Dzakaaul Islam , I Wayan Yogik Adnyana Putra Ni Wayan Ardiarani Utami, 2020 Redesain Interior Pasar Ngentak Desa Dayu di Kabupaten Blitar penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data kualitatif dimana hasil yang diperoleh adalah perancangan redesain Pasar Ngentak dengan tema kontemporer dan konsep etnik local khas Kabupaten Blitar yang memberi desain dan tatanan baru pada pasar tradisional,sehingga bisa mengatasi permasalahan ruang yang ada sekaligus mengubah pandangan tentang pasar tradisional menjadi positif (Islam et al., 2020).

Menurut Sampurna Imam dan Waseh, Hasuri dan Yusuf, Maulana 2018 Implementasi peraturan daerah nomor 3 tahun 2016 tentang Pengembangan , Pemberdayaan, Penataan Pasar Tradisional di kota Serang hasil penelitian menunjukkan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah kota Serang berupa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengembangan,pemberdayaan penataan pasar Tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, dalam mengimplementasikan perda tersebut pemerintah kota Serang secara teknis SKPD dalam hal ini dinas perindustrian , perdagangan dan koperasi, UPT pasar, Satpol

PP, dinas Perhubungan dan juga Pt Pesona Banten Persada yang terkait tidak berjalan dengan baik (SAMPURNA et al., 2018) (HS et al., 2023).

Menurut Ovyana Subekti, Syaiful Mahmud Abdulloh, Dian Suluh Kusuma Dewi, 2019 hal-hal yang menjadi penyebab tidak tertatanya pasar adalah tidak adanya peraturan desa sebagai pedoman dalam mengelola pasar serta ketidaktahuan dan keikutserataan para pengelola terkait kegiatan renovasi pasar desa, tidak adanya perpaduan sumber-sumber yang diperlukan dari produsen ke konsumen, tidak adanya pemahaman terhadap tujuan, komunikasi, koordinasi, penempatan tugas-tugas dengan benar serta penyalahgunaan wewenang pasar seperti tempat parkir (Subekti & Abdulloh, 2019).

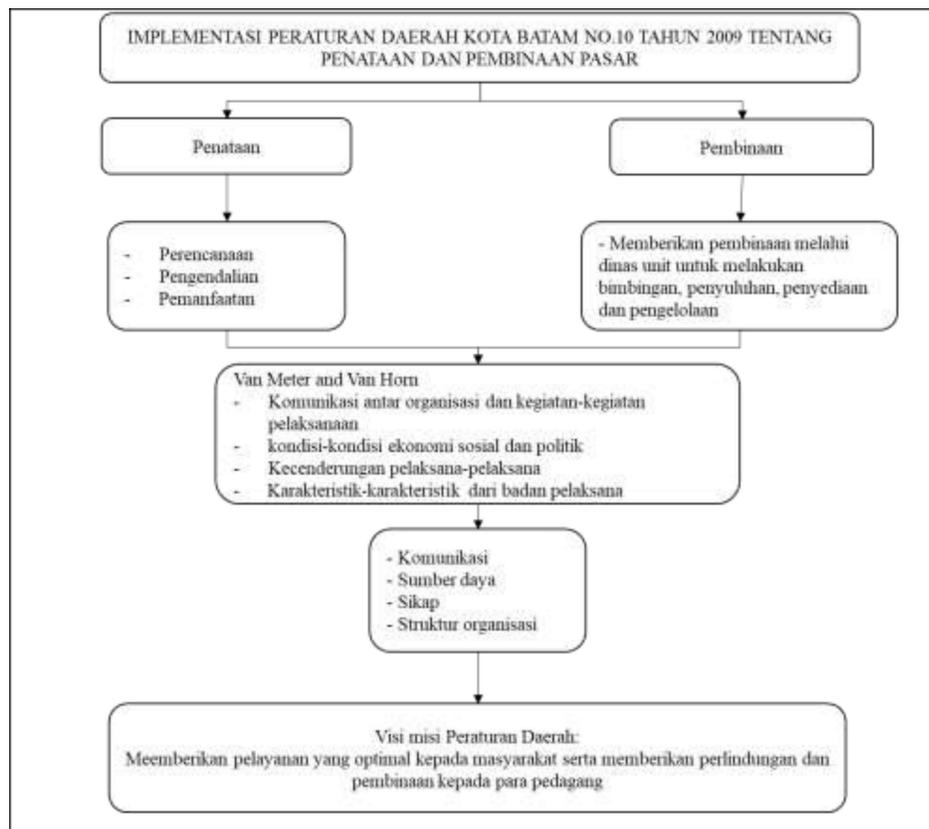
Menurut Muqowim, Ahmad, 2019 Implementasi penataan berdasarkan perda no 8 tahun 2012 tentang perlindungan pasar tradisional, penataan dan pengawasan pusat perbelanjaan dan toko modern perspektif masalah permasalahan studi di kota Batu adalah penataan pendirian toko modern dari pasar tradisional di kota Batu hanya berjarak 250 meter dan juga tidak memiliki izin yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pengoperasiannya (Hakiki, 2020) (Khairina, 2021).

Menurut Fitrianto Eka, 2018 Untuk memperkuat pasar Lenteng di Kabupaten Sumenep dilakukan segregasi hanya untuk memperbaiki fisik pasar saja, tetapi SDM tidak diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para pedagang di pasar Lenteng. Kendala yang dihadapi pemerintah antara lain Indomaret sebelum pasar Lenteng, serta kurangnya tenaga lapangan dan kurangnya lahan parkir (Tanzil & Juliprijanto, 2021) (Arsyadi & Arif, 2022).

2.8 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah gagasan tentang bagaimana sebuah teori berhubungan dengan berbagai hal yang telah diputuskan menjadi penting dengan menggunakan skema ataupun gambaran yang akan diteliti. Kerangka pemikiran merupakan sebuah teori yang konseptual yang berhubungan satu sama lain terhadap factor yang sudah diidentifikasi sebagai pokok masalah.

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan munculnya berbagai hal yang tertera pada Peraturan Daerah Kota Batam No. 10 Tahun 2009 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar yang tidak keseluruhan sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan. Cara berpikir penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2. 1. Kerangka Pemikiran